

**EVALUASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT  
(STUDI KASUS KELURAHAN KIJANG KOTA KECAMATAN BINTAN TIMUR  
KABUPATEN BINTAN)**

Rizky Nur Syafitri<sup>1</sup>, Edy Akhyary<sup>2</sup>, Fitri Kurnianingsih<sup>3</sup>  
Rizky.syf@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Abstract**

*The Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) is a movement of networks or groups of citizens at the community level that work in an integrated manner to achieve its goals, namely: Preventing violence against children, and Responding to cases that occur against children. Kelurahan Kijang Kota is a Kelurahan with a high level of cases against its children, because it needs to be evaluated. The purpose of this study was to evaluate the Community-Based Integrated Child Protection Program (Case Study of Kijang Urban Village, East Bintan District, Bintan Regency). The research method used is descriptive with a qualitative approach. The theory used is Daniel Stufflebeam's evaluation model, namely CIPP (context, input, process, product). The results of the study show 1) Context, the background of the formation of PATBM because of the many cases that occur to children, with the aim that PATBM activists can prevent and respond quickly if cases occur in children, and socialization that still needs to be developed again. 2) Input, the number of human resources is sufficient, it's just that to go to the field is still limited, and the lack of budget for PATBM, and the lack of facilities provided by the government for PATBM in the kelurahan. 3) Process, obstacles in PATBM are limited budget and time for activists, as well as future challenges so that there is cooperation with all elements in society. 4) Product, related to statistics on the increase or decrease in cases after the PATBM Program was not available, and for cases that occurred a lot, only for a small amount of reporting. Based on the results of the research and analysis conducted by the author, the conclusion is that Community-Based Integrated Child Protection in Kijang Kota Village has been running in accordance with the Community-Based Integrated Child Protection Guidelines (PATBM), but in its implementation there are still several obstacles, namely the lack of budget and also the lack of time for PATBM cadres in undergoing this PATBM. In the Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in Kijang Kota Village in dealing with and handling cases against children, the government pays more attention to the budget for this program.*

*Keywords: Program Evaluation, PATBM Program, CIPP*

**I. Pendahuluan**

Setiap anak pada hakekatnya memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sejak anak itu dilahirkan sampai dia berusia 18 tahun dan hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Dalam perlindungan anak peran orang tua juga penting karena diharapkan bisa memilah hal baik dan buruk yang bisa dilakukan oleh anak dan juga harus bisa memberikan informasi yang tepat kepada

anak tentang cara melindungi diri anak itu sendiri. sehingga dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait demi kebaikan anak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yaitu Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang merupakan program pemerintah pusat yaitu sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuannya yakni: Mencegah kekerasan terhadap anak, dan Menanggapi kasus yang terjadi terhadap anak. Selanjutnya, PATBM mempunyai regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat pusat yaitu Kemntrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, regulasi dan tata kelola organisasi ditingkat provinsi yaitu Badan atau Dinas yang mengurus PPPA di tingkat Provinsi, regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat Kota/Kabupaten yaitu Badan atau Dinas yang mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kota/kabupaten, regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat Desa/Kelurahan sesuai Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Data PATBM Di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021**

Tahun	Nama		Dibentuk Oleh
	Kelurahan	Desa	
2016	Sei Lekop		Kementrian PPPA
	Gunung Lengkuas		
2017	Tembeling Tanjung		Provinsi KEPRI
		Tembeling	
		Pengujan	
		Berakit	
2018	Tanjung Uban Kota		Kabupaten Bintan
	Tanjung Uban Selatan		
	Tanjung Permai		
	Teluk Lobam		
	Kijang Kota		
	Sungai Enam		
		Toapaya	
2019		Sebong Pereh	
		Sebong Lagoi	
		Teluk sebong	
		Kuala Sempang	
		Teluk Sasah	
2019	Kawal		Kabupaten Bintan
		Gunung Kijang	
		Malang Rapat	
2020	Toapaya Asri		

Tahun	Nama		Dibentuk Oleh
	Kelurahan	Desa	
2021		Toapaya Utara	Kabupaten Bintan
		Toapaya Selatan	
	Tanjung Uban Timur		
	Tanjung Uban Utara		
		Lancang Kuning	
		Busung	
Jumlah			29

Sumber : DP3AKB Kabupaten Bintan, 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pertama di dua Kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan yaitu Kelurahan Sei Lekop dan Kelurahan Gunung Lengkuas. Dilihat dari tahun 2016-2021 sudah terdapat 29 Kelurahan dan Desa yang sudah dibentuk dan dilatih PATBMnya.

**Tabel 1.2**

**Data Kasus Terhadap Anak Per Kelurahan Di Kecamatan Bintan Timur Tahun 2020**

No	Kelurahan	Kasus	Keterangan
1	Sei Enam	-	- Pencabulan
2	Sei Lekop	1	- Pelecehan Seksual
3	Kijang Kota	7	- KDRT
4	Gunung Lengkuas	2	- Terpapar Covid-19
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	- Percobaan Bunuh Diri - Laka Lantas

Sumber : Olahan Peneliti, 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa kasus terbanyak terjadi di Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur, dengan jumlah kasus yaitu 7 kasus. Selanjutnya Kelurahan Gunung Lengkuas dengan 2 kasus, Kelurahan Sei Lekop 1 kasus, dan Kelurahan Sungai Enam tidak ada kasus. Kasus-kasus yang terjadi di Kecamatan Bintan Timur terdiri dari pencabulan, pelecehan seksual, KDRT, terpapar covid-19, percobaan bunuh diri, dan laka lantas. Dalam hal ini Penulis akan melakukan penelitian di Kelurahan Kijang Kota disebabkan Kelurahan Kijang Kota merupakan daerah yang memiliki tingkat kasus terhadap anak yang paling tinggi dibandingkan dengan Kelurahan Sei Lekop, Kelurahan Gunung Lengkuas, dan Kelurahan Sungai enam.

Melihat permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan).”

## II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Mantra (2004) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, 2015:28). Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah data primer dan datar skunder yang dimana Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian dan Menurut Arikunto (2013:22) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu Perlindungan Anak

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kijang Kota. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada Seksi Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak, ketua forum komunikasi PATBM Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri, Ketua PATBM Kelurahan Kijang Kota, Kader PATBM Kelurahan Kijang Kota, serta masyarakat, dengan jumlah informan 11 orang. Dokumentasi dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, membuat catatan-catatan yang ditemui di lapangan serta mengambil beberapa gambar yang berhubungan dengan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data, yaitu dalam penelitian ini yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan Kesimpulan.

### III. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Annisa Dewi Rahmawati (2017) “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan sebagian kecil sudah terpenuhinya beberapa pemenuhan hak anak.

Antik Bintari dan Idil Akbar (2017), berjudul “Peningkatan Pengetahuan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Cipageran Kota Cimahi Tahun 2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, PPM di Kelurahan Cipageran dengan tema Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) baru tahap sosialisasi terfokus pada kader kegiatan yang sudah ada. Pemerintah Kota Cimahi khususnya bidang perlindungan anak merespon positif kegiatan PPM dan berupaya mengintegrasikan pada program tahun berjalan di Kota Cimahi.

Agustinus Pas dan Badrun Kartowagiran (2018) “Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan”. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kesenjangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah memenuhi hak dan kebutuhan anak jalanan dengan baik, kecuali pemenuhan hak identitas. Tugas Dinas Sosial selanjutnya adalah memenuhi hak identitas anak jalanan melalui kerjasama yang berkelanjutan dengan semua pihak terkait.

Nadia Ayu Mustikasari dan Dewi Rostyaningsih (2019) “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang sudah dilakukan dengan baik namun masih kurang optimal karena adanya beberapa kendala diantaranya kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang masih kurang, stigma negatif dari masyarakat, sulitnya mendapatkan sekolah bagi korban kekerasan, dan pengawasan yang tidak periodik.

Ratih Setyawati (2019), berjudul “Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengelolaan program PATBM Desa Ngalang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, monitoring, dan evaluasi. Kedua, manfaat dari PATBM Desa Ngalang yaitu adanya peningkatan kesadaran orangtua dalam pemenuhan hak-hak anak dan membantu perkembangan anak. Ketiga, faktor

penghambat pelaksanaan PATBM Desa Ngalang berasal dari faktor internal yaitu sumber daya manusia PATBM Desa Ngalang dan pendanaan yang terbatas.

Kecamatan Bintan Timur dibentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang pembentukan kelurahan/desa dan kecamatan baru, Kecamatan Bintan Timur terdiri dari 4 kelurahan yaitu: Kelurahan Gunung Lengkuas, Kelurahan Sei Lekop, Kelurahan Sungai Enam, dan Kelurahan Kijang Kota. Kelurahan Kijang Kota merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Berikut struktur organisasi kepengurusan aktifis program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Kijang Kota Kabupaten Bintan di atur dalam Surat Keputusan Lurah Kijang Kota Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kepengurusan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kijang Kota Periode 2018-2021, yang terdiri dari: (a) Penasehat, (b) Ketua, (c) Sekretaris, (d) Bendahara, (e) Anggota.

**Tabel 4.1**  
**Kegiatan PATBM Kelurahan Kijang Kota**

No	Bulan	Tempat	Kasus Terhadap Anak/ Kegiatan
1	Maret 2018	Jl. Beringin Indah Barat Gg. Pelita 1 RW.14	Anak lari dari rumah.
			Sosialisasi bahaya merokok, pernikahan dini, penggunaan narkoba
		Sembat Kp. Kolam Renang RT.003	Mengatasi masalah rebutan anak.
2	Mei 2018	Balai Pertemuan di RW 24	Sosialisasi di PKK, Memberi pengarahan kepada ibu-ibu PKK apa itu PATBM.
		Di rumah ibu Murni	Sosialisasi Dasa Wisma Mawar Indah 3, Memberi pengarahan kepada ibu Dasa Wisma RW 24 apa itu PATBM.
			Pendampingan kenakalan anak di bawah umur. Mencuri di warung kecil dengan pelaku 3 orang.
3	Juli 2018		Mendampingi anak yang kabur dari pesantren.
7	Agustus 2020		Pembagian masker kepada masyarakat Kelurahan Kijang Kota

*Sumber: Olahan Peneliti, 2021*

Menurut Cronbach dan Stufflebeam dalam Ahmad Hidayat (2018:36), evaluasi program adalah upaya yang dilakukan dalam menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Program-program yang telah diimplementasi perlu dievaluasi untuk menentukan apakah proses dari program tersebut telah mencapai target dan tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai, dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya, perlu adanya evaluasi program. Tanpa ada evaluasi, keberhasilan dan kegagalan program tidak dapat diketahui. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Peneliti menggunakan model yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam dengan indikator-indikator sebagai berikut: *context, input, process, and product*.

## Context

Orientasi utama dari evaluasi konteks adalah mengidentifikasi latar belakang perlunya mengadakan perubahan atau munculnya program. Evaluasi konteks diperlukan terhadap pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk mengetahui latarbelakang program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), tujuan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan sosialisasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Evaluasi *context* dapat dilihat dari:

Latar belakang dibentuknya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat karena banyaknya kasus yang terjadi kepada anak maka dibentuklah PATBM untuk memfasilitasi atau menampung permasalahan-permasalahan yang timbul terhadap anak dan membantu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Tujuan dibentuknya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat agar aktivis PATBM dapat mencegah dan merespon cepat jika terjadi kasus-kasus pada anak dan perempuan., dapat mengurangi kasus-kasus yang terjadi terhadap anak, agar hak-hak anak terpenuhi, dan dapat menyelesaikan atau mendampingi anak-anak yang menjadi korban kekerasan maupun pelaku kekerasan.

**Tabel 4.2**  
**Sosialisasi yang dilakukan oleh PATBM Kelurahan Kijang Kota**

No	Hari/ Tanggal	Tempat	Kegiatan	Topik
1	Sabtu, 3 Maret 2018		Sosialisasi	- Merokok - Pernikahan Dini - Penggunaan Narkoba
2	Kamis, 10 Mei 2018	Balai Pertemuan di RW 24	Sosialisasi di PKK	Memberi pengarahan kepada ibu-ibu PKK apa itu PATBM.
3	Kamis, 10 Mei 2018	Di rumah ibu Murni	Sosialisasi Dasa Wisma Mawar Indah 3	Memberi pengarahan kepada ibu Dasa Wisma RW 24 apa itu PATBM.

*Sumber: olahan peneliti, 2021*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh PATBM Kelurahan Kijang Kota hanya 3 kali di tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2019-2021 belum ada sosialisasi lagi yang dilakukan. Sosialisasi mengenai program Perlindungan Anak Tepadu Berbasis Masyarakat sosialisasi sudah ada sebatas memberikan pelatihan kepada aktivis PATBM terkait program tersebut. Dan dari para aktivis PATBM sudah ada juga sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat. Sosialisasi masih perlu dikembangkan lagi dikarenakan masih banyak ketidaktahuan masyarakat terkait adanya program PATBM ini.

## Input

Evaluasi *input* dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai sumber daya yang ada: sumber daya manusia Program PATBM, dan sumber daya finansial Program PATBM, serta sarana dan prasarana Program PATBM. Keberhasilan proses pelaksanaan program sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dalam proses pelaksanaannya menuntut sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas yang diisyaratkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil,

maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Bila dilihat dari sumber daya manusia, maka dalam proses pelaksanaan program PATBM diharapkan membangun sinergitas dengan lembaga desa/kelurahan – perangkat desa/aparat kelurahan, posyandu, PKK, kader KB, PATBM desa lain, dunia usaha, dan masyarakat. Namun, disini peneliti akan memfokuskan pada beberapa pihak yang benar-benar paham dan berkaitan langsung dengan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Sumber daya manusia yang melaksanakan program PATBM di Kelurahan Kijang Kota terkait jumlah sudah mencukupi, tetapi dalam menjalankan tugasnya tidak semua aktivis terlibat. Evaluasi *input* dapat dilihat dari:

Sumber daya manusia yaitu aktivis PATBM dalam program PATBM sudah mencukupi untuk jumlahnya, hanya saja untuk turun kelapangan masih terbatas dikarenakan mempunyai pekerjaan tetap. Dan terkait keterampilan yang diperoleh oleh aktivis dari pelatihan-pelatihan masih kurang maksimal.

Ketersediaan sumber daya finansial dalam menjalankan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ada sumber daya finansial. Karena, mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan sumber anggaran tidak tersedia, maka akan menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan program tersebut. Hal ini pun dapat menjadi bagian ketidakberhasilan pelaksanaan program. Sumber daya finansial Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat terlihat bahwa tidak ada anggaran tetap dalam menjalankan Program ini, dan juga tidak ada dukungan anggaran dari Kelurahan setempat.

Sarana dan prasarana operasional Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan sangat membantu dalam pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Sarana memiliki arti segala sesuatu (dapat berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:991), sedangkan kata prasarana memiliki arti segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:893). Sarana dan prasarana dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat terlihat bahwa sarana yang dimaksud yaitu laptop, infocous, sound system, hanya infocous dan sound system yang pernah diberikan kepada Ketua Forum Komunikasi PATBM, sedangkan untuk per PATBM di tingkat Lurah belum ada. Dan juga terkait prasarana yaitu gedung untuk melaksanakan kegiatan PATBM ada disediakan oleh Kantor Lurah.

### ***Process***

Evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan atau implementasi program dan juga untuk melihat apa tantangan kedepan dari Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ini. Untuk mewujudkan suatu daerah yang bebas kekerasan terhadap anak maupun dari anak bukanlah hal yang mudah, karena semua aspek harus terlibat. Evaluasi *Process* dapat dilihat dari:

Hambatan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yaitu anggaran merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan program ini, dikarenakan anggaran berkaitan dengan kapasitas aktivis yang bergerak dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ini. Adapun waktu para aktivis PATBM yang terbatas dalam menjalankan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Masih kurangnya personel PATBM, kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan program ini. Dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ini.

Tantangan kedepan dari Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yaitu untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana berharap mendapat anggaran yang cukup agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan PATBM. Dan tantangan ke depan bagi aktivis PATBM yaitu adanya kerjasama dengan semua

elemen yang ada di masyarakat dan dukungan dari pemimpin daerah tersebut dan tidak ada lagi kasus yang terjadi terhadap anak.

### ***Product***

Tujuan utama evaluasi produk adalah untuk mengukur, menginterpretasikan dan memutuskan hasil yang telah dicapai oleh program, yaitu apakah telah dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum (Endang Mulyatiningsih, 2011:132). Komponen *product* dalam penelitian ini yang akan di evaluasi adalah hasil yang diperoleh selama proses kegiatan PATBM berlangsung, apakah kasus yang terjadi terhadap anak sudah menurun?

Hasil yang diperoleh selama proses kegiatan PATBM berlangsung, apakah kasus yang terjadi terhadap anak sudah menurun?, salah satu dari narasumber mengatakan bahwa untuk kasus kekerasan, pelecehan, dan bully sudah berkurang sejak dibentuknya PATBM ini. Tetapi menurut 5 narasumber lainnya kasus yang terjadi itu masih banyak, hanya saja dalam pelaporannya sedikit, dikarenakan jika kasus tersebut yang melakukan adalah keluarga, maka mereka menganggap itu adalah aib bagi keluarga.

## **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penulis, kesimpulan bahwa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Kijang Kota sudah berjalan sesuai dengan Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Dengan menggunakan model evaluasi menurut Daniel Stufflebeam (dalam Suharsimi Arikunto dan Jabar, 2004:29) maka dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

### ***1. Context Evaluation***

Pada indikator ini yang melatarbelakangi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yaitu karena banyaknya kasus yang terjadi kepada anak maka dibentuklah PATBM untuk memfasilitasi atau menampung permasalahan-permasalahan yang timbul terhadap anak dan membantu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam memberikan perlindungan kepada anak. Dengan tujuan agar aktivis PATBM dapat mencegah dan merespon cepat jika terjadi kasus-kasus pada anak dan perempuan, dapat mengurangi kasus-kasus yang terjadi terhadap anak, agar hak-hak anak terpenuhi, dan dapat menyelesaikan atau mendampingi anak-anak yang menjadi korban kekerasan maupun pelaku kekerasan dan juga melakukan sosialisasi mengenai program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sudah ada sebatas memberikan pelatihan kepada aktivis PATBM terkait program tersebut. Dan dari para aktivis PATBM sudah ada juga sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Sosialisasi masih perlu dikembangkan lagi dikarenakan masih banyak ketidaktahuan masyarakat terkait adanya program PATBM ini.

### ***2. Input Evaluation***

Pada indikator ini sumber daya manusia yaitu aktivis PATBM dalam program PATBM sudah mencukupi untuk jumlahnya, hanya saja untuk turun kelapangan masih terbatas dikarenakan mempunyai pekerjaan tetap. Dan terkait keterampilan yang diperoleh oleh aktivis dari pelatihan-pelatihan masih kurang maksimal. Dan juga terkait sumber daya finansial Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, terlihat bahwa tidak ada anggaran tetap dalam menjalankan Program ini, dan juga tidak ada dukungan anggaran dari Kelurahan setempat. Adapun sarana dan prasarana dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, terlihat bahwa sarana yang dimaksud yaitu laptop, infocous, sound system, hanya infocous dan sound system yang pernah diberikan kepada Ketua Forum Komunikasi PATBM, sedangkan untuk per PATBM di tingkat Lurah

belum ada. Dan juga terkait prasarana yaitu gedung untuk melaksanakan kegiatan PATBM ada disediakan oleh Kantor Lurah.

### 3. *Process Evaluasion*

Pada indikator ini hambatan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yaitu anggaran merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan program ini, dikarenakan anggaran berkaitan dengan kapasitas aktivis yang bergerak dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ini. Adapun waktu para aktivis PATBM yang terbatas dalam menjalankan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Masih kurangnya personel PATBM, kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan program ini. Dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ini. Dan juga tantangan kedepan dari Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yaitu untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana berharap mendapat anggaran yang cukup agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan PATBM. Dan tantangan ke depan bagi aktivis PATBM yaitu adanya kerjasama dengan semua elemen yang ada di masyarakat dan dukungan dari pemimpin daerah tersebut dan tidak ada lagi kasus yang terjadi terhadap anak.

### 4. *Product Evaluasion*

Pada indikator ini untuk melihat tingkat kasus yang terjadi pada anak setelah adanya program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Permasalahannya tidak adanya statistik untuk menunjukkan apakah kasus yang terjadi kepada anak naik atau turun setiap tahunnya. Tetapi dari hasil wawancara mengatakan jumlah kasus itu banyak, hanya saja untuk pelaporannya sedikit.

## V. Daftar Referensi

### Buku

- Arikunto, S. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoretis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Siyoto, Sandu. & Sodik, M. Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

### Skripsi dan Jurnal

- Bintari, Antik dan Idil Akbar. 2017. Peningkatan Pengetahuan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Cipageran Kota Cimahi Tahun 2017. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.1, No.6.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hidayat, Ahmad. 2018. Evaluasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Sentiong Balaraja Mas Baru Kabupaten Tangerang. *Skripsi. Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*.
- Mustikasari, Nadia Ayu dan Dewi Rostyaningsih. 2019. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review* 9 (1), 160-174.
- Pas, Agustinus dan Badrun Kartowagiran. 2018. Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Vol.6, No.1:36-49.
- Rahmawati, Annisa Dewi. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. *Skripsi. Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.*

Setyawati, Ratih. 2019. Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol.3, No.2.*

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Edy Akhyary, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
2. Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.
4. Ketua PATBM, kader PATBM Kelurahan Kijang Kota serta masyarakat Kelurahan Kijang Kota.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Harapan Penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.